



PT. BPR SAMPURAGA CEMERLANG  
PERSERODA

# LAPORAN

# 2023

## PENERAPAN TATA KELOLA

🏠 JLN CEMPAKA NO 25 RT 003 RW 003, NANGA BULIK  
/LAMANDAU  
☎ 0532-6612 010  
📠 -

Telah disesuaikan dengan  
**SEOJK Nomor 24/SEOJK.03/2020**



OTORITAS  
JASA  
KEUANGAN





## BAB I PENJELASAN UMUM

### A. RUANG LINGKUP TATA KELOLA

Tata Kelola BPR menunjukkan pola hubungan antara Manajemen dengan stakeholders, Manajemen dengan Dewan Komisaris dan antar Manajemen yang didasarkan pada etika dan nilai budaya perusahaan yang ditunjang oleh suatu sistem, proses, pedoman kerja dan organisasi untuk mencapai kinerja yang maksimal.

### B. DASAR PENERAPAN TATA KELOLA

Dalam menerapkan corporate governance, PT. BPR Sampuraga Cemerlang Perseroda mengacu pada berbagai regulasi yang relevan dan terkini. Peraturan perundang-undangan yang dijadikan sebagai dasar penerapan corporate governance sebagai berikut:

- a. Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tanggal 25 Maret 1992 tentang Perbankan Sebagaimana diubah dengan Undang-undang No.10 Tahun 1998 tanggal 10 November 1998 tentang Perbankan.
- b. Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- c. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.62/POJK.03/2020 tanggal 16 Agustus 2020 tentang Bank Perkreditan Rakyat
- d. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.4/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi BPR.
- e. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.13/POJK.03/2015 tanggal 3 November 2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi BPR.
- f. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.44/POJK.03/2015 tanggal 15 Desember 2015 tentang Sertifikasi Kompetensi Kerja Bagi Anggota Direksi Dan Anggota Dewan Komisaris Bank Perkreditan Rakyat Dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
- g. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.27/POJK.03/2016 tanggal 22 Juli 2016 tentang Penilaian Kemampuan Dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan
- h. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.23/POJK.01/2019 tanggal 18 September 2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan.
- i. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.49/POJK.03/2017 tanggal 12 Juli 2017 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Perkreditan Rakyat.
- j. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.33/POJK.03/2018 tanggal 27 Desember 2018 tentang Penerapan Kualitas Aktiva Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif Bagi BPR.
- k. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.34/POJK.03/2018 tanggal 27 Desember 2018 tentang Penerapan Penilaian Kembali Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan.
- l. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.24/SEOJK.03/2020 tentang Perubahan atas SEOJK No.5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat.
- m. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.6/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Penerapan Fungsi Kepatuhan Bagi BPR
- n. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.7/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Standar Penerapan Fungsi Audit Intern Bagi BPR
- o. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.39/SEOJK.03/2016 tanggal 13 September 2016 tentang penilaian kemampuan dan kepatutan bagi calon Pemegang Saham Pengendali, calon anggota Direksi, dan calon anggota Dewan Komisaris Bank.
- p. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.41/SEOJK.03/2017 tanggal 19 Juli 2017 tentang



- Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Perkreditan Rakyat
- q. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.1/SEOJK.03/2019 tanggal 21 Januari 2019 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi BPR
  - r. Anggaran Dasar (AD) PT. BPR Sampuraga Cemerlang Perseroda beserta perubahan-perubahannya.
  - s. Peraturan-peraturan lainnya yang relevan dan terkini

### **C. TUJUAN PENERAPAN TATA KELOLA**

Melindungi kepentingan stakeholder..

### **D. PRINSIP-PRINSIP TATA KELOLA PT. BPR SAMPURAGA CEMERLANG PERSERODA**

#### **1 Transparency (Keterbukaan)**

Prinsip keterbukaan tetap memperhatikan ketentuan rahasia Perseroan, rahasia jabatan dan hak-hak pribadi sesuai peraturan yang berlaku..

#### **2 Accountability**

BPR menetapkan tugas dan tanggung jawab yang jelas bagi masing-masing organ anggota Dewan Komisaris, dan Direksi serta seluruh Jajaran di bawahnya yang selaras dengan visi, misi, nilai-nilai Perusahaan, sasaran usaha dan strategi BPR..

BPR harus meyakini bahwa masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi maupun seluruh Jajaran di bawahnya mempunyai kompetensi sesuai dengan tanggung jawabnya dan memahami perannya dalam pelaksanaan tata kelola BPR..

#### **3 Responsibility**

BPR berpegang pada prinsip kehati-hatian (Prudential Banking Principles) dan menjamin kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.

#### **4 Independency**

BPR mengambil keputusan secara obyektif dan bebas dari segala tekanan dari pihak manapun.

#### **5 Fairness**

BPR memberikan kesempatan kepada seluruh stakeholders untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan BPR serta membuka akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip keterbukaan.

### **E. KOMITMEN PENERAPAN TATA KELOLA**

PT. BPR Sampuraga Cemerlang Perseroda telah berkomitmen untuk melakukan internalisasi prinsip-prinsip tata kelola kedalam kebijakan-kebijakan operasional yang berlaku. PT. BPR Sampuraga Cemerlang Perseroda menyadari internalisasi prinsip-prinsip tata kelola yang lebih luas secara berkelanjutan perlu dilakukan untuk meningkatkan kualitas dan cakupan implementasi tata kelola di setiap aspek kegiatan PT. BPR Sampuraga Cemerlang Perseroda.



## BAB II TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA

### A. PENGUNGKAPAN PENERAPAN TATA KELOLA

#### 1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

No	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi
1	<p>Nama : MILSON</p> <hr/> <p>NIK : 6209030306890001</p> <hr/> <p>Jabatan : 0200 - Direktur</p> <hr/> <p>Tugas dan Tanggung Jawab : Untuk Sekarang Direktur Operasional membawahi fungsi Kepatuhan rangkap jabatan sekaligus merangkap sebagai Direktur Utama dengan Keputusan yang dibuat di RUPS dan dituangkan di SK Mandat Dan Kontrak Kinerja. tugas Direktur selama menjabat di PT.BPR Sampuraga Cemerlang Perseroda menjalankan bisnis BPR sesuai dengan arahan dari PSP yaitu membantu masyarakat dalam memberi modal usaha dan memberantas rentenir yang sangat meresahkan bagi masyarakat yang terbelit dengan rentenir, diharapkan dengan adanya BPR Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau dapat bersenergi dalam pembangunan Kabupaten Lamandau menuju Lamandau Juara sebagai semboyan Kabupaten Lamandau, selain itu tugas Direktur adalah memberikan kontribusi kepada Kabupaten Lamandau dengan menyumbangkan laba untuk Kabupaten Lamandau dan mengadakan Literasi inklusi dan edukasi kepada masyarakat bahwa menabung adalah untuk mendukung kehidupan yang lebih baik.</p>
Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris	
Direksi telah melakukan pengembangan produk dan layanan secara terus menerus untuk menyikapi perkembangan digital banking dan kebutuhan nasabah yang terus berkembang	

#### 2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Komisaris

No	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Komisaris
1	<p>Nama : MUHAMAD IRWANSYAH, SP.MP</p> <hr/> <p>NIK : 6209032710770001</p> <hr/> <p>Jabatan : Komisaris Utama</p> <hr/> <p>Tugas dan Tanggung Jawab : Tugas Pokok Dewan Komisaris adalah mengawasi kinerja Direksi PT.BPR Sampuraga Cemerlang Perseroda dalam menjalankan roda bisnis BPR sesuai dengan peraturan OJK dan Perundang-undangan.</p>
Rekomendasi Kepada Direksi	



Agar Direksi melakukan pengembangan produk dan layanan secara terus menerus untuk menyikapi perkembangan digital banking dan kebutuhan nasabah yang terus berkembang

### 3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite (jika ada)

#### a. Tugas dan Tanggung Jawab Komite

No	Tugas dan Tanggung Jawab Komite
1	Komite Audit Tugas dan Tanggung Jawab : -
2	Komite Pemantau Risiko Tugas dan Tanggung Jawab : -
3	Komite Remunerasi dan Nominasi Tugas dan Tanggung Jawab : -

#### b. Struktur, Keanggotaan, Keahlian dan Independensi Anggota Komite

No	Nama	NIK	Keahlian	Komite			Pihak Independen
				Audit	Pemantau Risiko	Remunerasi & Nominasi	
-	-	-	-	-	-	-	-

#### c. Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite

No	Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite
1	Komite Audit
	Program Kerja : -
	Realisasi : -
	Jumlah Rapat : -
2	Komite Pemantau Risiko
	Program Kerja : -
	Realisasi : -
	Jumlah Rapat : -
3	Komite Remunerasi dan Nominasi
	Program Kerja : -
	Realisasi : -
	Jumlah Rapat : -

## B. KEPEMILIKAN SAHAM DIREKSI

### 1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR

No	Nama Anggota Direksi	NIK	Nominal	Persentase Kepemilikan (%)
1	MILSON	6209030306890001	-	-



2. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain

No	Nama Anggota Direksi	NIK	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
-	-	-	-	-	-

C. HUBUNGAN KEUANGAN DAN/ATAU HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DIREKSI DENGAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS, ANGGOTA DIREKSI LAIN DAN/ATAU PEMEGANG SAHAM BPR

1. Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR

No	Nama Anggota Direksi	NIK	Hubungan Keuangan		
			Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	MILSON	6209030306890001	tidak ada	tidak ada	tidak ada

2. Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR

No	Nama Anggota Direksi	NIK	Hubungan Keluarga		
			Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	MILSON	6209030306890001	tidak ada	tidak ada	tidak ada

D. KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DEWAN KOMISARIS

1. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	NIK	Nominal	Persentase Kepemilikan (%)
1	MUHAMAD IRWANSYAH, SP.MP	6209032710770001	-	-

2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	NIK	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
-	-	-	-	-	-

E. HUBUNGAN KEUANGAN DAN/ATAU HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DENGAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS LAIN, ANGGOTA DIREKSI LAIN DAN/ATAU PEMEGANG SAHAM BPR

1. Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	NIK	Hubungan Keuangan		
			Anggota Dewan Komisaris Lain	Anggota Direksi	Pemegang Saham
1	MUHAMAD IRWANSYAH, SP. MP	6209032710770001	tidak ada	tidak ada	tidak ada



## 2. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	NIK	Hubungan Keluarga		
			Anggota Dewan Komisaris Lain	Anggota Direksi	Pemegang Saham
1	MUHAMAD IRWANSYAH, SP. MP	6209032710770001	tidak ada	tidak ada	tidak ada

## F. PAKET/KEBIJAKAN REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN BAGI DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS YANG DITETAPKAN BERDASARKAN RUPS

### 1. Paket/Kebijakan Remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

No	Jenis Remunerasi (dalam 1 tahun)	Direksi		Dewan Komisaris	
		Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)
1	Gaji	1	235.200.000	1	174.408.000
2	Tunjangan	1	124.600.000	1	0
3	Tantiem	1	0	1	16.065.322
4	Kompensasi berbasis saham	1	0	1	0
5	Remunerasi lainnya	1	0	1	0
Total			359.800.000		190.473.322

### 2. Uraian Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

No	Jenis Fasilitas Lain (dalam 1 tahun)	Uraian Fasilitas Disertai dengan Jumlah Fasilitas (Unit)	
		Direksi	Dewan Komisaris
1	Perumahan	-	-
2	Transportasi	-	-
3	Asuransi Kesehatan	-	-
4	Fasilitas lainnya	-	-

## G. RASIO GAJI TERTINGGI DAN GAJI TERENDAH

Rasio gaji tertinggi dan gaji terendah dalam perbandingan.

Keterangan	Perbandingan	
	(a/b)	1
Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)	1,62	1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)	0,00	0
Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b)	0,00	0
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (b)	2,31	1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji Pegawai yang tertinggi (b)	4,75	1



## H. FREKUENSI RAPAT DEWAN KOMISARIS

### 1. Pelaksanaan Rapat Dalam 1(satu) Tahun

No	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/Materi Pembahasan
1	2023-9-15	5	Pembahasan Rapat : 1. Persetujuan PSP terhadap Laporan Pertanggung jawaban Direksi Periode 2022 telah dibuat dan diserahkan ke Pemegang saham melalui Sekretariat Komisaris PT. BPR Sampuraga Cemerlang Perseroda 2. Keputusan Tanggapan Hasil Audit Independen Kantor Akuntan Publik (KAP) Mengenai Management Letter, Pemeriksaan Periode Tahun 2022
2	2023-12-12	4	Pembahasan Rapat : 1. Disetujuinya Lopan Pertanggung jawaban Direksi Periode Tahun 2022, pengesahaan Laporan Keuangan tahun 2023 dan Laporan Realisasi Rencana Bisnis Semester ke II Tahun 2022. 2. Disetujui Laporan Keuangan Tahun 2022. 3. Disetujui Laporan Realisasi Rencana Bisnis semester II Tahun 2022. 4. Menanggapi hasil temuan audit oleh KAP Sudyono dan Vera terkait Management Letter. 5. Disetujui Kantor akuntan Publik (KAP) yang sudah terdaftar di badan pemeriksaan keuangan (BPK)
3	2023-12-28	5	Pembahasan Rapat : 1. Persetujuan Komisaris Utama terkait daftar penerima tunjangan pendidikan, bonus dan jaspro 2. Penyampaian posisi Laporan Keuangan Per Desember 2023 3. Kekosongan pengurus di beberapa Jabatan

### 2. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	NIK	Jumlah Peserta		Tingkat Kehadiran (dalam %)
			Fisik	Telekonferensi	
1	MUHAMAD IRWANSYAH, SP.MP	6209032710770001	5	0	166,00%

## I. JUMLAH PENYIMPANGAN INTERNAL (INTERNAL FRAUD)

Jumlah Penyimpangan Internal (Dalam 1 Tahun)	Jumlah kasus yang dilakukan oleh							
	Direksi		Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023
Total Fraud	-	-	-	-	-	-	-	-
Telah Diselesaikan	-	-	-	-	-	-	-	-
Dalam proses penyelesaian	-	-	-	-	-	-	-	-
Belum diupayakan penyelesaiannya	-	-	-	-	-	-	-	-
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum	-	-	-	-	-	-	-	-

## J. PERMASALAHAN HUKUM YANG DIHADAPI

Permasalahan Hukum	Jumlah (satuan)	
	Perdata	Pidana
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	-	-
Dalam proses penyelesaian	6	-
Total	6	-





**K. TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN**

No	Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan			Pengambil Keputusan			Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (Jutaan Rupiah)	Keterangan
	Nama	Jabatan	NIK	Nama	Jabatan	NIK			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**L. PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL DAN KEGIATAN POLITIK**

No	Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	Jumlah Dana (Rp)
1	2023-01-06	Sosial	PT. BPR SAMPURAGA CEMERLANG PERSERODA SELALU MENDUKUNG KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN OLEH PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU	PANITIA HUT SATPAM 42	3.500.000.000
2	2023-02-06	Sosial	PT. BPR SAMPURAGA CEMERLANG PERSERODA TURUT BERPATISIPASI DALAM KEGIATAN HUT KECAMATAN SEMATU JAYA YANG KE 18 TAHUN	PANITIA HUT KECAMATAN SEMATU JAYA	1.000.000.000
3	2024-02-22	Sosial	PT. BPR SAMPURAGA CEMERLANG PERSERODA TURUT BERPATISIPASI DALAM TURNAMEN FUTSAL PADA VASCO LESMANA FC	PANITIA VASCO LESMANA	2.000.000.000
4	2023-06-09	Sosial	PT. BPR SAMPURAGA CEMERLANG PERSERODA IKUT MENYUMBANG PEMBELIAN BENDERA MERAH PUTIH KE PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU, DAN DIBAGIKAN KE SETIAP WARGA DISEKITAR NANGA BULIK	PANITIA PEMBELIAN BENDERA MERAH PUTIH	1.760.000
5	2023-06-09	Sosial	PT. BPR SAMPURAGA CEMERLANG PERSERODA IKUT MENYUMBANG DALAM KEGIATAN PENGUMPULAN DANA UNTUK KEGIATAN KONTINGEN KABUPATEN LAMANDAU PADA ACARA PORPROV.	PANITIA DANA KONTINGAN	500.000
6	2024-06-19	Sosial	PT. BPR SAMPURAGA CEMERLANG PERSERODA IKUT BERPATISIPASI DALAM SUMBANGAN DANA UNTUK KEGIATAN OLAH RAGA DIKECAMATAN BULIK, DAN BPR SANGAT MENDUKUNG KEGIATAN YANG DILAKUKAN KECAMATAN BULIK AGAR MENDAPATKAN ATLET-ATLET YANG HANDAL UNTUK MEMPERSIAPKAN TURNAMEN DI PROVINSI	PANITIA KCEMATAN BULIK	500.000



7	2023-06-19	Sosial	PT. BPR SAMPURAGA CEMERLANG PERSERODA TURUT Mendukung PEMBANGUNAN Masjid Jami'Al Ikhlas di Desa Bunut dan diharapkan dengan Sumbangan ini dapat membantu PEMBANGUNAN tersebut dan KEGIATAN Rohani dapat segera terlaksana.	PANITIA PEMBANGUNAN Masjid Jami'Al Ikhlas Desa Bunut	750.000
8	2023-07-05	Sosial	PT. BPR SAMPURAGA CEMERLANG PERSERODA TURUT Mendukung dalam bentuk Dana untuk KEGIATAN Bina Raga yang dilaksanakan di Kabupaten Lamandau, BPR berharap dengan adanya KEGIATAN tersebut KEGIATAN Bina Raga tersebut mendapatkan atlet-atlet yang berprestasi.	PANITIA DANA BINA RAGA	300.000
9	2024-07-14	Sosial	PT. BPR SAMPURAGA CEMERLANG PERSERODA IKUT BERTICIPASI dalam KEGIATAN FESTIVAL Balayah Balanting yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Lamandau	PANITIA FESTIVAL BALAYAH BALANTING	800.000

## M. PENUTUP

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola PT. BPR Sampuraga Cemerlang Perseroda ini selain untuk keperluan mematuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, Laporan ini diharapkan dapat digunakan untuk kepentingan stakeholders guna mengetahui kinerja BPR dan pelaksanaan Tata Kelola di PT. BPR Sampuraga Cemerlang Perseroda. Melalui Laporan ini, BPR ingin menunjukkan pola hubungan antara Manajemen dengan stakeholders, Manajemen dengan Dewan Komisaris dan antar Manajemen yang didasarkan pada etika dan nilai budaya perusahaan yang ditunjang oleh suatu sistem, proses, pedoman kerja dan organisasi untuk mencapai kinerja yang maksimal. Demikian kami sampaikan Laporan Pelaksanaan Tata Kelola PT. BPR Sampuraga Cemerlang Perseroda ini agar menjadi gambaran yang jelas dan utuh pelaksanaan Tata Kelola di PT. BPR Sampuraga Cemerlang Perseroda, Terima Kasih.

**NANGA BULIK/LAMANDAU, 30 Januari 2024**  
Persetujuan Pengurus PT. BPR Sampuraga Cemerlang Perseroda